

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berada di benua Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berbatasan langsung dengan Benua Asia disebelah utara, Benua Australia disebelah selatan, Samudera Hindia disebelah barat, dan Samudera Pasifik disebelah timur. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik di darat, laut, maupun udara. Indonesia juga bertetangga dengan Negara China, India, dan Thailand, dimana Negara-negara tersebut sedang menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Selain itu, Indonesia juga berada pada titik persilangan perekonomian dunia dan perdagangan internasional, baik Negara-negara industri maju maupun berkembang. Di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Negara Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Timor Leste.

Pada era global seperti sekarang ini, sebuah Negara tidak mungkin untuk hidup menyendiri. Negara perlu membuka diri dan menjalin kerjasama dengan Negara-negara lain. Kepentingan nasional merupakan salah satu tujuan dilakukannya kerjasama antarnegara. Dengan adanya kerjasama antarnegara maka kepentingan nasional suatu Negara dalam kancah global tetap terjaga dan dapat tercapai sesuai dengan tujuan Negara tersebut (Supriyatno, 2014). Suatu Negara melakukan kerjasama internasional atas dasar kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan tujuan untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Keberhasilan

mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa.

Begitu pula dengan Indonesia, hubungan luar negeri Indonesia dengan Negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan Negara lain. Dalam menjalin hubungan luar negeri, Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory*. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Dalam kerjasama di bidang pertahanan antarnegara dapat berdampak negatif dan positif untuk Negara yang tergabung dalam kerjasama tersebut. Karena kerjasama pertahanan akan memperlihatkan ciri dan arah perjalanan dari suatu Negara, serta kepentingan nasional apa yang diharapkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang terpaksa dilakukan karena berdasarkan kepentingan nasional dari masing - masing negara (Supriyatno, 2014). Terdapat berbagai macam kerjasama pertahanan, salah satunya yaitu kerjasama dalam pembuatan alutsista.

Dalam upaya mengembangkan alutsista buatan sendiri, Indonesia melakukan kerjasama dalam pembuatan alutsista dengan Korea Selatan. Pertahanan Korea Selatan sendiri sebagian besar masih bergantung pada Amerika. Korea Selatan baru mulai memproduksi senjatanya sendiri secara signifikan mulai tahun 1970-an. Namun, kekuatan militer yang

dimiliki Korea Selatan dapat dikatakan masih berada dibawah Amerika Serikat, Rusia, dan China.

Kerjasama militer Indonesia dan Korea Selatan telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Korea Selatan menempatkan seorang atase militernya di Kedutaan Besar Korea di Jakarta pada tahun 1974. Sedangkan penempatan atase militer Indonesia di KBRI Seoul baru dimulai pada tahun 1979., yaitu dengan menunjuk Kolonel Agus Sugianto (Yang, 2005). Kerjasama pertahanan yang kedua negara ini lakukan yaitu kerja sama di bidang pertahanan (*Defence Cooperations Agreement/DCA*) tahun 2013, MoU kerja sama logistik dan industri pertahanan tahun 1990 dan tahun 1995, serta pengaturan kerja sama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Korea Selatan tentang kerja sama saling mendukung logistik MLSA (*Mutual Logistics Support Arrangement*) tahun 2011 .

Untuk meningkatkan program kerjasama di bidang industri pertahanan, kedua Negara membuat proyek pengembangan militer gabungan, Jet tempur KFX (Korea Fighter Xperiment) /IFX (Indonesia Fighter Xperiment). Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama tersebut pada 15 Juli 2010. Selain itu, kedua negara Asia ini juga menjalin kerjasama dalam pembangunan 3 kapal selam. Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering* (DSME). Sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya, bekerja sama dengan DSME Korsel (Denita, 2017).

Selain menjalin kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan berbagai Negara yang memiliki kekuatan militer yang besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, ketiga Negara ini merupakan Negara dengan peringkat 3 besar dalam kekuatan militernya (Global Fire Power, 2017). Indonesia melakukan

kerjasama militer dengan Amerika Serikat di mulai pada tahun 1950-an. Dalam kerjasama tersebut, kedua Negara bersepakat dalam pembelian senjata militer, seperti pesawat tempur, helikopter dan peralatan perang lainnya. Kekuatan militer AS dapat dikatakan sebagai kekuatan militer terbesar sejadat. Selain itu, kedua Negara juga sepakat untuk melaksanakan program pelatihan dan pendidikan militer internasional (IMET). Pada tahun 2011, Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan dalam pembelian 24 jet F-16 bekas dari Amerika senilai US\$ 750 juta. Proyek tersebut dinamakan Peace Bima Sena II, menyusul Peace Bima Sena I pada tahun 1986.

Kekuatan militer AS tak hanya mengandalkan kuantitas alat perang. Kekuatan militer AS tidak hanya mengandalkan kuantitas alat perang. Tetapi juga memiliki jumlah yang sangat banyak, bahkan tidak ada senjata tua. Hampir semua senjata yang dimiliki merupakan senjata yang baru dan canggih. AS juga memiliki pesawat generasi terbaru seperti F-22 Raptor yang dapat merontokkan pesawat tempur mana pun di dunia. Di bagian darat dan laut pun AS memiliki superior dari segi statistik

Indonesia juga menjalin kerjasama militer dengan Negara yang memiliki kekuatan militer besar setelah AS, yaitu Rusia. Rusia memiliki tank terbesar di dunia dan pesawat militer kedua terbesar didunia. Rusia dikenal sebagai negara dengan perlengkapan militer yang mumpuni. Kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan rusia sepakat untuk membentuk Komis Kerjasama Teknik Militer (KKTM). Selain itu kedua Negara juga sepakat mengenai implementasi kerjasama militer 2006-2010. Rusia memberikan *state credit* 1 miliar dollar AS bagi pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa 2006-2010. Departemen pertahanan RI menggunakan pinjaman

yang diberikan Rusia untuk pengadaan 10 helikopter MI-17-V5 dan 5 Helikopter MI-35P beserta persenjataannya bagi TNI AD. Sejak tahun 2000-an, Indonesia membeli beberapa pesawat dari Rusia, diantaranya seperti Pesawat Su27/flanker, pesawat Su30/Flanker (2003), dan Pesawat Su27/ SKM (2010) (Perwita & Bandoro, 2012). Saat ini Indonesia dan Rusia telah sepakat melakukan imbal beli dalam pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan berupa 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35.

Selain kedua Negara tersebut, Indonesia juga menjalin kerjasama pertahanan dengan China, yang merupakan Negara dengan kekuatan militer terbesar ketiga. Jumlah persenjataan yang dimiliki China seperti tank, ACV (*Armoured Combat Vehicle*), dan artileri patut diperhitungkan. Serta kapal selam yang dimiliki China yaitu sebanyak 69 unit, termasuk didalamnya kapal yang dipersenjatai dengan peluru kendali. Begitu pula dengan Angkatan Udaranya, China menempati urutan teratas untuk kekuatan pesawat tempur jenis *fighter* di Asia pasifik. China, Rusia, dan Amerika Serikat merupakan tiga Negara yang memiliki angkatan udara terkuat dengan dukungan pesawat tempur yang besar (Sinaga, 2013). Kerjasama yang dilakukan kedua Negara ini mencakup kerjasama di bidang kelembagaan, kerjasama di bidang pertukaran dan alih teknologi, pembelian senjata, serta bidang pendidikan (pertukaran siswa militer) dan pelatihan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan China telah meratifikasi perjanjian pertahanan yang dibuat sebagai payung hukum untuk pertahanan masa depan kedua Negara. Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan ke tingkat yang lebih tinggi termasuk riset pertahanan, transfer teknologi dan produksi bersama. Pada tahun 2013, kedua Negara menandatangani Letter of Intent untuk pembuatan bersama rudal anti-kapal C-705.

Indonesia telah menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai Negara dengan kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Tetapi, dalam upaya

pengembangan alutsistanya, Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan yang kekuatan militernya dapat dikatakan masih berada dibawah ketiga Negara tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini penulis ingin mengetahui kepentingan Indonesia dalam memilih Korea Selatan sebagai partner kerjasama pertahanannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil pokok permasalahan yaitu “ *Mengapa Indonesia memilih Korea Selatan sebagai partner dalam pembuatan alutsista?* “

## **C. Kerangka Berfikir**

Untuk menganalisa permasalahan diatas, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis.

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Keinginan semua Negara pada dasarnya yaitu untuk memenuhi segala kebutuhannya namun keterbatasan selalu menghalangi pencapaiannya, untuk memenuhi kebutuhannya Negara akan melakukan interaksi dan komunikasi terhadap Negara yang dianggap akan memberikan bantuan kerjasama. Moh Jafar hafsa menyebutkan definisi kerjasama

*“kerjasama adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangkawaktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”*

Kerjasama antarnegara memiliki berbagai dimensi atau jenis, yang paling utamanya adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negaranya dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Negara tersebut (Supriyatno, 2014). Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu keberhasilan kerjasama dapat diukur dari perbandingan besarnya manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang ditanggung (Soeprapto, 1997). Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat berbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial.

Kerjasama pertahanan, merupakan kerjasama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu Negara, karena kerjasama ini sangat sensitif dan akan menyangkut kedaulatan Negara, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara, dan juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri. (Mas'ood, 1990)

Dalam menganalisa permasalahan diatas, penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlin. Menurut Nuechterlin dimensi di dalam kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang mampu digunakan untuk menyeimbangkan diri mengenai perilaku. Selain itu dimensi membahas tentang kebijakan luar negeri, dan kebijakan yang ditempuh dalam kepentingan publik.

Menurut Nuechterlin terdapat empat dimensi di dalam kepentingan nasional, yaitu:

1. Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara serta wilayahnya dan sistem politiknya dari ancaman negara lain;
2. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
3. Kepentingan ketertiban dunia bertujuan untuk menjaga politik internasional dan sistem ekonomi dengan tujuan negara tersebut merasa aman dan warga negaranya dapat beraktivitas dengan baik di luar negara tersebut
4. Kepentingan ideologi, ialah kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain (Nadhifa, 2013).

Dalam permasalahan yang penulis ambil, Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Negara lain pastinya memiliki sebuah kepentingan nasional yang hendak diwujudkan. Berdasarkan pendapat Donald E. Nuechterlin, maka kepentingan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan Negara lain adalah bentuk dari kepentingan pertahanan Indonesia dimana Indonesia ingin menciptakan alutsistanya sendiri, sehingga Indonesia dapat mengatasi berbagai ancaman keamanan; kepentingan ekonomi Indonesia, Indonesia ingin meningkatkan hubungan ekonomi, kerjasama militer ini sebagai penghubung beberapa kerjasama ekonomi. Indonesia juga ingin melakukan kerjasama militer dengan biaya yang lebih murah; kepentingan ideologi, Indonesia ingin agar negaranya tidak bergantung pada Negara lain, sehingga dapat menjaga ideologinya.

Selain itu dalam menganalisa permasalahan yang penulis ambil, penulis juga menggunakan teori tentang

pembuatan keputusan politik luar negeri Graham T. Allison. Politik luar negeri merupakan strategi tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*decision maker*) suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu Negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan Negara lain. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional suatu Negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu Negara terhadap masyarakat internasional, dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu Negara atau bangsa (Warsito, 1998)

Graham T. Allison mengajukan 3 model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Dalam menjelaskan permasalahan yang penulis ambil, penulis akan menggunakan model I : Aktor rasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. (Mas'oed, 1990)

Model aktor rasional “ klasik”, mengasumsikan bahwa Negara adalah pemain kunci dan mereka bertindak rasional, dengan menghitung kerugian dan keuntungan dari berbagai pilihan kebijakan (alternatif) dalam memaksimalkan utilitas

mereka (Dougherty & Pfaltzgraff, 2001) Tindakan politik luar negeri dipilih oleh Negara untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Negara menjadi actor dan eksekutor dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam menetapkan kerjasama pertahanan dengan Negara lain, Indonesia mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan. Berikut merupakan penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian yang akan didapat Indonesia:

**Tabel 1. 1 Keuntungan dan Kerugian yang akan didapat Indonesia**

No.	Indikator	Korea Selatan	Amerika	Rusia	China
1.	Teknologi canggih	-	✓	✓	✓
2.	Ancaman embargo	-	✓	-	-
3.	<i>Transfer of Technology</i>	✓	-	✓	✓
4.	Harga murah	✓	-	✓	✓
5.	Sentimen negatif dari Amerika	-	-	✓	✓

Keterangan :

1. Pada tahun 1999-2000 militer Indonesia menerima sanksi embargo dari Amerika. Saat itu, pesawat tempur Indonesia yang kebanyakan adalah bantuan AS tidak bisa terbang karena tidak adanya suku cadang. Sedangkan Rusia, China dan Korea Selatan

selama ini belum pernah melakukan embargo untuk Indonesia.

2. Amerika enggan melakukan *transfer of technology*. Amerika bahkan mengurangi beberapa fungsi dari peralatan tempur yang dibeli karena takut kalah saing. Kemudian pada tahun 2013, Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan produksi bersama rudal antikapal C-705 untuk Angkatan Laut Indonesia namun masih terdapat kendala. Begitu pula dengan kerjasama Indonesia dengan Rusia, Kerjasama *Transfer of Technology* yang dilaksanakan juga mengalami beberapa kendala. Sedangkan Korea Selatan adalah Negara pertama yang memberikan transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam dan jet tempur masa depan kepada Indonesia.
3. Amerika sulit melakukan negosiasi atas penjualan semua peralatan militernya, oleh karena itu harga senjata yang dijual Amerika tergolong mahal bagi Indonesia. Sedangkan Rusia, dalam pembelian peralatan militernya bisa dinego dengan imbal beli sembako. Dalam proyek transfer teknologi pengembangan militer gabungan, Jet tempur KFX (Korea Fighter Xperiment) /IFX (Indonesia Fighter Xperiment), pihak Korea Selatan akan menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, Korean Aerospace Industry menanggung 20 persennya, dan Pemerintah Indonesia 20 persen. Indonesia mendapatkan harga yang murah, begitu pula dengan kerjasama kapal selam, Indonesia juga mendapatkan harga yang murah.
4. Rusia dan China merupakan dua Negara yang menjadi saingan Amerika. Hal ini dikarenakan perbedaan ideologi diantara mereka.

Dalam tabel tersebut telah jelaskan bagaimana keuntungan dan kerugian yang akan didapat Indonesia jika melakukan kerjasama pembuatan alutsista dengan Negara-negara tersebut. Silmy karim dalam bukunya yang berjudul "Membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia", Negara-negara produsen alutsista dunia (seperti Amerika, Rusia dan China) mempunyai kepentingan untuk mengontrol produk yang mereka jual. Juga kepentingan agar kekuatan militer Negara pembeli tidak membahayakan bagi aliansi mereka. Oleh karena itu, pembelian alutsista juga merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dalam konteks kemandirian, Mandiri dalam membeli berarti suatu Negara berhak membeli alutsista tanpa tekanan atau didikte Negara lain. Kemandirian membeli ini menjadi penting bagi Negara seperti Indonesia yang tidak masuk aliansi pertahanan mana pun di dunia. Persoalan transfer teknologi menjadi catatan penting dalam kemandirian dalam membeli. Negara produsen atau importir cenderung menyimpan dan membatasi transfer teknologi. Atas dasar itu, jika suatu Negara ingin mencapai kemandirian industri pertahanan, kepemilikan (*ownership*) atas teknologi dan kemampuan (*capacity*) dalam riset serta pengembangan teknologi menjadi syarat yang wajib dipenuhi, sambil meneruskan opsi kebijakan lain, yakni kerjasama pertahanan di bidang produksi bersama (*joint production*) atau penerapan kebijakan offset serta transfer teknologi. Dalam rangka menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri, pembelian suatu produk alutsista harus disertai dengan proses transfer teknologi melalui mekanisme *offset* atau tingkat pencapaian ahli teknologi dari produsen luar negeri ke dalam negeri. Pada saat itu, Korea Selatan menawarkan kepada Indonesia untuk melakukan kerjasama *Transfer of Technology* dalam upaya pembangunan kapal selam dan jet tempur masa depan kepada Indonesia. Kemudian, Rusia dan China juga menawarkan kerjasama *Transfer of Technology*, namun kerjasama dengan kedua Negara tersebut dinilai masih memiliki kekurangan yaitu salah satunya adanya sentimen

negatif dari Amerika yang dapat mengakibatkan adanya embargo yang diberikan Amerika kepada Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepentingan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian pengembangan alutsistanya, Indonesia memilih Korea Selatan sebagai partner kerjasama pertahanan dalam proyek pembangunan kapal selam dan jet tempur. Korea Selatan juga menawarkan kerjasama dengan pendanaan yang lebih murah. Hal ini sesuai dengan kepentingan ekonomi Indonesia. Namun bukan berarti Indonesia tidak akan menjalin kerjasama dengan Amerika, Rusia, dan China. Karena Indonesia tetap mengandalkan politik luar negeri bebas aktif yang tidak memihak ke Negara manapun.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mendapatkan jawaban sementara. Menurut penulis, alasan Indonesia dalam memilih Korea Selatan sebagai partner kerjasama karena Indonesia akan memperoleh keuntungan-keuntungan diantaranya :

*Pertama*, adanya *Transfer of Technology*.

*Kedua*, kerjasama pembuatan alutsista dengan pendanaan yang murah.

*Ketiga*, tidak adanya ancaman embargo.

*Keempat*, tidak adanya sentimen negatif dari Amerika.

#### **E. Metodologi**

##### **a) Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui

dokumen-dokumen, buku, berita di internet, jurnal internasional, laporan penelitian, serta e-book yang terpercaya sebagai acuan dan kerangka pedoman teori untuk mengkaji masalah yang diteliti.

**b) Metode pencarian data**

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan sekunder, yaitu dengan menggunakan Teknik *Library Research* atau Studi Pustaka. Sumber data diambil dari dokumen-dokumen, buku, berita di internet, jurnal internasional, laporan penelitian, serta e-book yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

**c) Metode analisa**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan dan gambaran secara sistematis dan akurat terkait fakta dan tindakan dari fenomena yang dianalisa.

**F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian sangat diperlukan sebagai langkah untuk menghindari luasnya pembahasan yang akan diteliti. Pembatasan ini digunakan agar penelitian yang disusun dapat lebih fokus dan mengarah pada sasaran objek permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya pada era Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Karena pada saat itu kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan seperti proyek pengembangan pesawat KFX/IFX dan pembangunan 3 kapal selam dimulai. Namun tidak menutup kemungkinan pembahasan penulisan diluar dari jangkauan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I : berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah , rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, metodologi, dan sistematika penelitian.

Bab II : berisi tentang sistem pertahanan Indonesia dan kerjasama pertahanan. Dalam bab ini juga akan bercerita tentang keadaan militer di Indonesia.

Bab III : berisi tentang kerjasama pertahanan Indonesia, yang akan menceritakan tentang kerjasama pembuatan alutsista Indonesia dengan Amerika, Rusia , China dan Korea Selatan.

Bab IV : berisi tentang alasan Indonesia yang lebih memilih Korea Selatan sebagai partner dalam upaya pengembangan alutsistanya. Penjelasan mengenai keuntungan Indonesia jika bekerjasama dengan Korea Selatan.

Bab V : berisi tentang kesimpulan,yaitu ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.